

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bagian ini, dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang dirumuskan dari deskripsi, temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian dalam Bab IV.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I hingga bab IV, penulis hendak menyimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Peristiwa Yasmin sebagai konflik antar umat beragama, tidak hanya disebabkan oleh faktor situasi intern keberagamaan seperti pemahaman atau penafsiran yang eksklusif atau intoleran. Konflik tersebut, juga dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berkelindan dan tumpang-tindih. Konflik antar umat beragama seperti yang terlihat dalam kasus Yasmin juga dipengaruhi oleh banyak faktor di luar persoalan teologi dan ideologi keberagamaan seperti kondisi objektif dan perubahan kehidupan sosial ekonomi dan politik warga yang berkonflik serta menguatnya kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik tertentu yang dikembangkan sejumlah elite agama, ekonomi, dan politik. Konflik juga lahir akibat dari kebijakan makro yang tidak didasarkan pada asas keadilan, kesejahteraan, dan supremasi hukum. Kenyataan tersebut memperkuat pandangan teoretik bahwa konflik antar umat beragama, seperti halnya konflik-konflik sosial lain, tidak bisa dilepaskan dari *structural condusivenes*.

2. Kehadiran berbagai faham, organisasi, dan gerakan Islam yang sering dikategori keras seperti HTI, FPI, MMI, dan Salafi merupakan kenyataan historis yang menambah pluralitas Islam dan kekayaan etnografis di Kota Bogor dengan seluruh konsekuensi perubahannya pada aspek-aspek lain seperti kebudayaan setempat. Akan tetapi, kecenderungan mereka untuk mendominasi kehidupan, atas nama apapun, telah menorehkan peran tersendiri dalam melahirkan dan memperuncing konflik Yasmin. Kecenderungan yang mendominasi tersebut, mereka wujudkan secara terus-terang dalam manuver politik, bahkan memainkan politik itu sendiri bersama elite politik dan birokrasi setempat.
3. Pendekatan terhadap konflik seperti Yasmin oleh para tokoh agama dan pejabat birokrasi masih terlihat sangat formal, melalui kelembagaan dalam bentuk dialog yang hanya dihadiri oleh sejumlah elite, tanpa melibatkan warga atau jemaat yang berkonflik. Resolusi dalam bentuk dialog dalam kasus Yasmin sepertinya hanya mengulang resolusi-resolusi yang pernah dipraktikkan dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah selama ini yang telah dikritik karena selalu mengalami jalan buntu dan tidak melahirkan teologi kerukunan yang menjamin perdamaian permanen.
4. Kasus Yasmin yang dibawa dalam ranah hukum oleh pemerintah Kota Bogor, ternyata menyebabkan konflik semakin rumit. Pilihan untuk membela kaum muslim yang menolak pembangunan gereja dengan alasan menciptakan ketertiban dengan mencabut IMB yang ia keluarkan sebelumnya justru berlawanan dengan keputusan Pengadilan (PTUN sampai Mahkamah Agung)

yang secara tegas mengesahkan IMB bangunan gereja. Permasalahan pun mengerucut pada kontradiksi hukum yang jauh lebih sulit untuk mengatasinya karena melibatkan persoalan lain di luar soal konflik itu sendiri.

5. Tidak adanya mediator dalam proses resolusi konflik Yasmin ini akan menjadi batu sandungan dalam penyelesaiannya. Hal ini disebabkan teguhnya keinginan kedua belah pihak baik umat muslim maupun GKI dalam kepentingannya masing-masing. Keadaan ini semakin sulit dengan keluarnya kebijakan Walikota untuk mencabut IMB pembangunan gereja sehingga jalan untuk melakukan mediasi semakin sulit. Untuk itu diperlukan mediator yang mampu memediasi kedua belah pihak untuk tercapainya resolusi konflik yang *win win solution*. Dalam melakukan resolusi, mediator haruslah melewati empat tahap mediasi sebagai berikut. *Pertama*, tahap pendahuluan dengan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk mulai berbicara secara terbuka dalam tatap-muka. *Kedua*, pemaparan kisah, yakni memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan aneka keprihatinan masing-masing, menjelaskan pertikaian itu dari sudut pandang masing-masing, dan mendengarkan pandangan pihak lain. *Ketiga*, pemecahan masalah, dengan membangun kesadaran bahwa pertikaian adalah masalah bersama dengan cara menolong kedua belah pihak mengidentifikasi aneka persoalan yang memisahkan mereka serta merumuskan, mengevaluasi, dan menegosiasikan aneka opsi ke arah penyelesaian. *Keempat*, merumuskan aneka butir kesepakatan yang adil dan lestari, termasuk cara-cara menangani aneka masalah yang mungkin timbul di kemudian hari

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan pengembangan pengembangan resolusi konflik antar umat beragama melalui pendekatan kewarganegaraan, sebagai berikut:

1. Cara pandang atau perspektif untuk melihat konflik antar umat beragama yang selama ini digunakan perlu diubah, dengan terlebih dahulu melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif terhadap beberapa kasus konflik yang berbeda dan di tempat berbeda pula. Penelitian itu harus menggunakan multidisipliner (antropologi, sosiologi, politik, sejarah, agama, dan kebijakan publik), sehingga mampu menjelaskan konflik antar umat beragama dari beberapa sudut yang berkaitan. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan bahan untuk menyusun resolusi yang strategis dan menghasilkan capaian sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kasus Yasmin lebih merupakan persoalan kebijakan publik, maka pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengkajian dan proses demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, perlu dan penting untuk dipergunakan baik untuk meneliti, menyikapi, maupun untuk bahan pertimbangan menyusun resolusi konflik.
3. Dengan semakin tergerusnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses melihat dan menyelesaikan konflik antar umat beragama seperti nampak jelas dalam kasus Yasmin, dirasa sangat penting untuk mengevaluasi secara kritis pelaksanaan dan praktik Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan

formal. Evaluasi kritis ini sangat urgent demi perbaikan sistem dan metodologi agar praktik Pendidikan Kewarganegaraan berdampak luas terhadap pembangunan kesadaran warga masyarakat sejak dini.

4. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan perlu untuk diperluas, tidak hanya di sekolah-sekolah formal, tetapi sampai ke masyarakat pada umumnya. Hal itu penting agar kontinuitas pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai di tengah pergumulan majemuk dapat terus dipupuk dan terjaga.
5. Pilihan konsep kewarganegaraan yang mengerucutkan kekuasaan secara sentralistik dan otoriter, menempatkan kedaulatan pada elite politik dan tidak pada warga atau rakyat, perlu ditinjau ulang. Kewarganegaraan perlu dikembalikan pada konsep dan praktiknya yang mengatur relasi warga-negara secara seimbang dan simboisis dimana kedaulatan berada pada warga atau rakyat. Dengan dikembalikannya kewarganegaraan pada penciptaan keseimbangan hubungan warga-negara, keragaman, ke-bhineka-an, ke-berbagai-an, dan kemajemukan akan dapat dijaga dan dikembangkan sebagai sumber energi utama dinamika perjalanan bangsa. Dengan mengembalikan kedaulatan pada rakyat, tiadanya sentralisasi dan kemandirian, dan terjaganya ke-bhineka-an, setiap kebijakan publik diwajibkan dapat pemeratakan kesejahteraan, menciptakan keadilan, menegakkan supremasi hukum, demokrasi, dan masyarakat sipil. Dengan terciptanya kesejahteraan, keadilan, supremasi hukum, demokrasi, dan masyarakat sipil, konflik-konflik sosial

dapat diinstitusionalisasi atau diregulasi menjadi kekuatan dinamik sebuah bangsa.

